

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

PROVINSI JAWA TENGAH

2021



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

PROVINSI JAWA TENGAH

2021



**INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
DI JAWA TENGAH
2021**

<https://jateng.bps.go.id>

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI JAWA TENGAH 2021

ISBN :
No. Publikasi : 33000.2271
Katalog : 4601008.33
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : x + 44 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah I

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Surya Iestari

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

Kata Pengantar

Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah 2021 menyajikan analisis deskriptif hasil penghitungan IDI 2021 untuk membantu pengguna data memahami nilai indeks demokrasi di Jawa Tengah.

Publikasi ini memuat hal-hal yang terkait dengan perkembangan aspek, dan indikator IDI. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan demokrasi di Jawa Tengah.

Penyajian informasi diuraikan secara sederhana dalam bentuk tabel, gambar serta uraian ringkas. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, November 2022

Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Jawa Tengah



Ir. Adhi Wiriana, M.Si



<https://jateng.bps.go.id>

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
INFOGRAFIS BESARAN NILAI DEMOKRASI DI JAWA TENGAH	1
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Sistematika Penulisan	4
BAB 2 DEMOKRASI DI INDONESIA	5
2.1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	6
2.2 Metode Baru Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia	9
2.2.1. Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru	9
2.2.2. Sumber Data Indeks Demokrasi Indonesia	13
2.2.3. Alur Kerja Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia dengan Metode Baru	14
2.2.4. Teknik Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru	17
BAB 3 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DI JAWA TENGAH	27
BAB 4 PERBANDINGAN DENGAN PROVINSI LAIN DI INDONESIA	33



<https://jateng.bps.go.id>

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1	Bobot Aspek pada IDI Komposit 18
Tabel 2.2	Bobot Indikator pada Aspek Kebebasan 18
Tabel 2.3	Bobot pada Indikator Aspek Kesetaraan 19
Tabel 2.4	Bobot pada Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 19
Tabel 2.5	Nilai ideal dan terburuk setiap indikator 20
Lampiran 1	Indeks Aspek, dan Skor Indikator IDI Provinsi Jawa Tengah 2021 39
Lampiran 2	Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi 41
Lampiran 3	Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi 43



<https://jateng.bps.go.id>

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 3.1 Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah Menurut Aspek	28
Gambar 3.2 Indeks Demokrasi Jawa Tengah menurut Indikator pada Aspek Kebebasan	29
Gambar 3.3 Indeks Demokrasi Jawa Tengah menurut Indikator pada Aspek Kesenjangan	31
Gambar 3.4 Indeks Demokrasi Jawa Tengah menurut Indikator pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	32
Gambar 4.1 Indeks Demokrasi Provinsi menurut Peringkat	33
Gambar 4.2 Indeks Aspek Kebebasan menurut Provinsi ...	35
Gambar 4.3 Indeks Aspek Kesenjangan menurut Provinsi ..	36
Gambar 4.4 Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi menurut Provinsi	37



<https://jateng.bps.go.id>

BESARAN NILAI DEMOKRASI DI JAWA TENGAH

IDI 2021

81,15 poin

Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI)
2021
dipengaruhi oleh

3

aspek
demokrasi



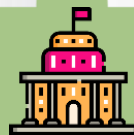
1 KEBEBASAN

87,90 poin



2 KESETARAAN

77,68 poin



3 KAPASITAS
LEMBAGA
DEMOKRASI

78,63 poin



- IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi
- Metodologi penghitungan IDI menggunakan 3 sumber data yaitu: (1) review surat kabar cetak maupun portal berita online lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), dan (3) Focus Group Discussion (FGD)



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH




BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2009, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara rutin melaporkan hasil penilaian terhadap kualitas demokrasi di Indonesia hingga tingkat provinsi. Selama hampir satu dasawarsa terakhir itu, IDI menunjukkan bahwa pranata demokrasi di Indonesia terus berkembang dan mengalami banyak kemajuan, demikian juga kondisi di Jawa Tengah. Namun demikian, sejumlah tantangan serius terhadap demokrasi, yang tidak tertangkap oleh pengukuran IDI, telah menahan laju perkembangan tersebut. Di antara tantangan yang mengancam demokrasi, sebagaimana ditunjukkan berbagai literatur dan kajian kontemporer, adalah bangkitnya kekuatan otoritarian lama, cengkeraman oligarki, klientelisme, politik uang, ketimpangan ekonomi, penyalahgunaan politik identitas, hingga polarisasi masyarakat yang tak jarang berujung pada kekerasan. Melihat persoalan-persoalan tersebut, beberapa lembaga pemeringkat demokrasi bahkan menilai demokrasi Indonesia mengalami kemunduran.

Dalam konteks itu, muncul kebutuhan untuk merefleksikan kembali pelaksanaan IDI dengan konteks dan tantangan demokrasi saat ini. Direktorat Politik dan Komunikasi (Ditpolkom) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2018 mengagendakan studi penelusuran IDI sebagai bagian dari persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Melalui



kajian tersebut, IDI diharapkan dapat mempunyai basis teoretis dan metodologis yang lebih kuat dalam memahami demokrasi sesuai dengan konteks dan perkembangan yang diuraikan di atas. Kajian tersebut juga diharapkan dapat menimbang kemungkinan IDI untuk mengukur hal-hal yang selama ini belum tercakup seperti kinerja demokrasi di tingkat nasional dan provinsi serta dimensi ekonomi dalam demokrasi, sehingga IDI dapat memberi arah bagi pembangunan politik dan demokratisasi di Indonesia.

1.2 Tujuan

Secara umum, tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah untuk menggambarkan sejauh mana kondisi demokrasi di Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu juga untuk memperoleh secara lengkap gambaran mengenai aspek, dan indikator demokrasi penentu nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Ketersediaan data ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam hal kehidupan berdemokrasi.


1.3 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, publikasi ini disajikan dalam empat bab yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan serta sistematika penulisan. Bab II menjelaskan demokrasi di Indonesia. Bab III mengulas mengenai Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Jawa Tengah. Bab IV mengulas perbandingan IDI Jawa Tengah dengan provinsi lain di Indonesia.



BAB 2 DEMOKRASI DI INDONESIA

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan untuk semua warga negara. Sistem politik ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Sekalipun demikian, pada prakteknya negara-negara yang mengaku demokratis tidak otomatis melakukan pengelolaan negara dan kekuasaan dengan norma-norma demokrasi. Assiddiqie (2005: 242-245) mengidentifikasi tiga persoalan yang muncul dalam kesenjangan antara gagasan dan pelaksanaan demokrasi. *Pertama*, hal yang paling nyata, meskipun 97 persen negara yang ada di zaman modern ini mengklaim menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, tetapi praktek penerapannya di lapangan berbeda antara satu negara dengan yang lain, mulai dari Amerika Serikat sampai ke RRC, Kuba, bahkan eks-Uni Sovyet semua mengklaim menganut demokrasi. Perbedaan ini antara lain karena adanya jarak konseptual antara kaum individualis dengan kaum kolektivis. Kaum liberalis-individualis menganggap rakyat yang berdaulat adalah individu yang otonom sedangkan kaum kolektivis-komunis menganggap rakyat yang berdaulat dalam pengertian kolektif dan totaliter (*totalitarian*). *Kedua*, demokrasi juga mendapat tantangan dari kaum agamawan yang lebih meyakini kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan, dan bukan berasal dari rakyat. *Ketiga*, gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat dalam kenyataan beragamanya cara orang mempraktekan, seringkali




dipraktekkan secara sepihak oleh para penguasa. Bahkan di sepanjang sejarah, corak penerapannya juga terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dengan konsepsi tersebut, tidak ada jaminan jika demokrasi menjadi *deficit* sebagai jargon penguasa. Diperlukan instrumen universal yang dapat mengukur pelaksanaan demokrasi dan perkembangannya di berbagai negara. Beberapa lembaga internasional menawarkan sistem yang memungkinkan untuk melakukan kuantifikasi terhadap demokrasi. *Freedom House* misalnya, sejak tahun 1972 melakukan pengukuran demokrasi dengan klasifikasi *free countries, partly free*.

2.1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010 – 2014, 2015 – 2019, serta 2020–2024. IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenkopohukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. IDI pertama kali dihitung BPS pada 2009 dan yang terbaru IDI 2020. Selama 12 tahun penghitungan dijumpai beberapa indikator tidak lagi relevan sehingga perlu perbaikan. Selain itu saran dan masukan juga diperoleh dari berbagai kalangan. Sekalipun demikian perubahan tidak serta-merta dapat dilakukan, agar indeks yang diperoleh bisa dibandingkan. Oleh karena itu diperlukan proses yang tidak sederhana untuk melakukan kajian revisi, agar hasilnya bisa lebih baik dari metode yang ada.


Melalui proses kajian literatur yang mencakup studi atas teori dan konsep demokrasi, studi perbandingan antar indeks demokrasi, dan studi terhadap konstitusi (UUD 1945) tim kajian merumuskan dua hal penting.



Pertama, pembaharuan teori dan konsep demokrasi dalam pengukuran IDI revisi. Kedua, pembaharuan prinsip-prinsip kunci demokrasi dalam pengukuran indeks. Pembaharuan teori dan konsep soal demokrasi yang digunakan dalam penyusunan IDI metode baru merujuk pada konsepsi demokrasi menurut Hee Yeon Cho (2012). Ada sejumlah alasan yang mendasari pembaharuan konsep demokrasi pada penyusunan IDI dengan menggunakan metode baru, yaitu (2018: v-vi):

1. Cho Memaknai demokrasi dalam konteks pengalaman demokrasi negara-negara Asia pasca rezim otoriter, seperti yang dihadapi Indonesia.
2. Transisi dari otoritarianisme ke demokrasi di Indonesia sudah berhasil dilalui dengan pembentukan institusi-institusi demokrasi, namun Indonesia seperti halnya negara-negara Asia lainnya mengalami tantangan konsolidasi demokrasi karena munculnya kekuatan oligarki, masyarakat sipil yang terfragmentasi, ketimpangan ekonomi, serta pemilu dan pelembagaan demokrasi yang masih dalam tatanan prosedural.
3. Terdapat monopoli sumber daya kekuasaan yang tidak hanya di ranah politik, tetapi juga di ranah ekonomi dan sosial. Sehingga konsep demonopolisasi Cho yang mencakup tiga ranah (politik, ekonomi, dan sosial) sangat relevan dengan konteks dan tantangan yang dihadapi Indonesia.

Menurut Cho, inti dari demokrasi adalah penyebaran kekuasaan. Demokrasi dimaknai sebagai proses demonopolisasi. Demokrasi tercapai




ketika kekuasaan sudah tersebar, tidak terkonsentrasi pada sekelompok orang. Demokrasi merupakan formasi sosial yang tercipta dari pertarungan dari beragam kelompok sosial. Kondisi demokratis tercapai jika terjadi demopolisasi kekuasaan dan sumber daya di ranah politik, ekonomi dan sosial.

IDI memiliki sejumlah manfaat, utamanya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia yang didasarkan atas data-data dengan tolok ukur yang jelas. Data-data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi, data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh pemangku kepentingan dapat menunjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses deliberasi perumusan kebijakan dan program pembangunan politik/-demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.

IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak




hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah saja.

2.2. Metode Baru Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia

2.2.1 Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru melihat demokrasi secara holistik tidak hanya dari ranah politik saja tapi juga ranah ekonomi dan sosial. Demonopolisasi politik adalah proses penyebaran kekuasaan politik yang ditandai oleh terjaminnya kebebasan politik (*liberalization*) untuk berkompetisi dan hadirnya kekuatan politik otonom yang terlepas dari represi/tindak kekerasan negara. Kontrol terhadap kekuasaan politik hadir dalam wujud kesetaraan (*equalization*) dalam partisipasi dan perwakilan politik di berbagai institusi politik pengambil keputusan. Penyebaran kekuasaan politik akan mencegah eksklusi politik dan menghadirkan partisipasi yang inklusif.

Dalam perspektif demonopolisasi maka aspek kebebasan diartikan sebagai sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Sedangkan aspek kesetaraan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusi) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Selain dua aspek tersebut, demonopolisasi juga dilihat dari aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi



menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan.


Demonopolisasi ekonomi adalah proses penyebaran sumber daya ekonomi yang terkonsentrasi pada satu kelompok, ditandai oleh terbukanya akses kompetisi dan kesetaraan untuk meraih sumber daya ekonomi tanpa diskriminasi. Penyebaran kekuasaan ekonomi akan mengantisipasi ketimpangan dan mendorong kesetaraan untuk memastikan warga terbebas dari kemiskinan.

Demonopolisasi sosial adalah proses penyebaran sumber daya sosial untuk mengikis diskriminasi dengan menghadirkan kepercayaan, solidaritas, martabat dan penghormatan atas keragaman nilai dan budaya. Penyebaran kekuasaan sosial akan mencegah diskriminasi dan mewujudkan pluralisme.

Dinamika di ketiga ranah tersebut turut mempengaruhi dinamika proses demokratisasi. Berdasarkan hasil studi literatur terhadap teori-teori demokrasi tim merumuskan tiga prinsip utama demokrasi yang terdiri dari (1) prinsip kebebasan, (2) prinsip kesetaraan dan (3) peran lembaga negara. Indeks Demokrasi Indonesia metode baru menggunakan ketiga prinsip yaitu kebebasan, kesetaraan dan peran lembaga negara untuk mengukur sejauh mana demonopolisasi terjadi di ketiga ranah (politik, ekonomi, dan sosial).

a. Aspek Kebebasan

Aspek kebebasan diartikan sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan




politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Aspek kebebasan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

- Indikator 1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara.
- Indikator 2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat.
- Indikator 3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan.
- Indikator 4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.
- Indikator 5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat.
- Indikator 6. Pemenuhan hak-hak pekerja.
- Indikator 7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

b. Aspek Kesetaraan

Aspek kesetaraan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusi) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya di sini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memungkinkan kelompok-kelompok



minoritas untuk berdaya. Aspek kesetaraan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

- Indikator 8. Kesetaraan gender
- Indikator 9. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan
- Indikator 10. Anti monopoli sumber daya ekonomi
- Indikator 11. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial
- Indikator 12. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah
- Indikator 13. Akses masyarakat terhadap informasi publik
- Indikator 14. Kesetaraan dalam pelayanan dasar

c. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur sejauh mana kinerja lembaga-lembaga demokrasi, eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu, dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Aspek kapasitas demokrasi diukur dari 8 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

- Indikator 15. Kinerja Lembaga Legislatif
- Indikator 16. Kinerja Lembaga Yudikatif
- Indikator 17. Netralitas Penyelenggara Pemilu
- Indikator 18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah.


- Indikator 19. Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
- Indikator 20. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah.
- Indikator 21. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.
- Indikator 22. Pendidikan politik pada kader partai politik.

2.2.2 Sumber Data Indeks Demokrasi Indonesia

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan IDI metode baru, meliputi data yang bersumber dari media massa, dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD)

Media massa/koran yang digunakan adalah koran dengan oplah terbesar yang ada di sebuah provinsi (dalam hal ini koran Suara Merdeka merupakan koran dengan oplah terbesar dan jangkauan terluas untuk Provinsi Jawa Tengah). Pengecualian jika koran tersebut memiliki segmen yang spesifik (misal ekonomi, atau kriminalitas) sehingga tidak banyak memuat berita-berita yang bersifat umum. Selain itu juga menggunakan portal berita online dengan mekanisme *web scrapping*

Untuk data provinsi yang bersumber dari dokumen, baik berupa Perda, Perpub, Surat Edaran dan sebagainya akan dikumpulkan oleh personel BPS Provinsi. Sementara untuk data yang bersumber dari dokumen pusat dan nasional akan dikumpulkan oleh Fungsi Statistik Politik dan Keamanan di BPS RI. Dalam pengumpulan data BPS dibantu oleh Pokja IDI provinsi, yaitu lembaga yang berisikan instansi terkait data IDI, akademisi, jurnalis, serta organisasi kemasyarakatan.



Dalam proses verifikasi, jika tim BPS membutuhkan pandangan dari pihak lain akan mengundang penghasil data, atau pakar di bidang terkait dalam FGD IDI.


2.2.3 Alur Kerja Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia dengan Metode Baru

Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Secara keseluruhan pengumpulan data IDI mencakup tiga tahapan, yaitu:

1. Review Media Koding surat kabar

Review media dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data *kuantitatif* (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun) berkaitan dengan 3 Aspek, dan 22 indikator IDI 2021.

Penggunaan media, khususnya surat kabar cetak maupun portal berita online dengan mekanisme *web scrapping*, sebagai sumber data untuk mengukur demokrasi mungkin tidak lazim digunakan, sebab itu perlu mendapatkan penjelasan khusus. Surat kabarlah yang merekam kehidupan daerah, termasuk didalamnya denyut demokrasi, selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari. Bukan berarti surat kabar tidak memiliki kelemahan. Keterbatasan surat kabar seperti



kemungkinan bias-bias editorial dan wartawan, keterbatasan jangkauan liputan, keterbatasan ruang, dan keterbatasan keahlian wartawan. Namun, disamping keterbatasan tersebut dan dengan asumsi surat kabar di Indonesia adalah surat kabar yang bebas dan merupakan sumber data mengenai demokrasi provinsi yang cukup baik. Terlebih dalam hal yang berkaitan dengan gairah spontan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di daerah.

Dalam konteks penyusunan IDI, persyaratan yang pertama merujuk pada 3 aspek, 22 indikator IDI. Sedangkan untuk memenuhi syarat yang kedua, ditetapkan media surat kabar, dan untuk ini telah dipilih satu surat kabar, yakni surat kabar lokal dengan oplah tertinggi. Provinsi Jawa Tengah menggunakan surat kabar Suara Merdeka.

2. Review Dokumen

Dokumen dan data resmi K/L/D/I merupakan data sekunder yang relevan dengan indikator tertentu yang diukur. Sumber ini dipilih karena memiliki validitas tinggi karena merupakan data resmi, serta mampu memberikan gambaran makro/menyeluruh terhadap sebuah fenomena dalam satu tahun pengukuran.

Untuk *review* dokumen, yang digunakan adalah semua dokumen resmi (tertulis) yang masih berlaku dan terkait dengan indikator IDI dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Dokumen dapat berupa catatan, laporan, *press release*, Perda, surat edaran, maupun surat keputusan serta dokumen-dokumen resmi lainnya.

Selain itu, IDI dengan metode baru juga dilakukan pengumpulan data sekunder dari kementerian/lembaga/dinas/instansi terkait.

3. *Focus Group Discussion* (FGD) IDI

Focus Group Discussion (FGD) merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 1998:1). Diskusi dalam FGD bersifat bebas, terbuka, seimbang, dalam menyampaikan informasi. Semua peserta juga diharapkan dapat terlibat aktif dalam berpendapat. Keragaman kelompok sebagai subyek utama FGD harus dijaga agar data dan informasi yang didapat memiliki perspektif yang lengkap. Diskusi dalam FGD memiliki tema dan batasan yang spesifik sehingga diharapkan dapat menghasilkan data sesuai tujuan.

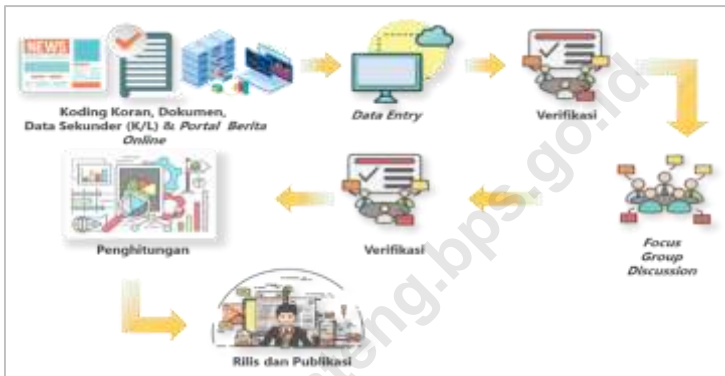
Secara umum, terdapat dua tujuan dari FGD IDI yaitu:

- a. memverifikasi, mengkonfirmasi, dan meluruskan data kuantitatif berkaitan dengan indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan dan bersumber dari *review* media/surat kabar dan dokumen,
- b. mengeksplorasi dan memberikan konteks atas kasus atau informasi yang telah dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen, selain juga untuk menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan dokumen.

Dalam *focus group discussion* (FGD) ada tiga hal utama yang menjadi tujuan, yaitu: konfirmasi, klarifikasi (koreksi), serta eksplorasi data baru yang belum tercakup dalam data kuantitatif. Validasi silang juga akan dilakukan pada data-data yang ada di FGD dengan menggunakan data kuantitatif yang tersedia. FGD akan dipimpin oleh fasilitator yang merupakan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi. Peserta FGD

merupakan perwakilan pemerintah, aparat keamanan, universitas, pers, tokoh masyarakat, serta LSM.

Skema Penyusunan IDI Metode Baru



2.2.4 Teknik Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru

Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia tingkat provinsi secara umum dapat diformulasikan sebagai berikut:

IDI provinsi = f (aspek kebebasan di tingkat provinsi, aspek kesetaraan di tingkat provinsi, aspek kapasitas lembaga demokrasi di tingkat provinsi)

IDI provinsi dihitung dengan penimbang terhadap aspek dan indikator. Penimbang didapatkan dari metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas Saaty merupakan salah satu metode pembobotan dengan pendekatan untuk menentukan prioritas (untuk menjawab pertanyaan indikator mana yang lebih penting antara satu dengan yang lain). Dari hasil penghitungan, diperoleh bobot untuk 22 indikator IDI provinsi sebagai berikut.

Tabel 2.1 Bobot Aspek pada IDI Komposit

	Aspek	Bobot
1	Aspek Kebebasan	0.310
2	Aspek Kesenjangan	0.376
3	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	0.314

Tabel 2.2 Bobot Indikator pada Aspek Kebebasan

	Indikator	Bobot
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	0.161
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	0.125
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	0.175
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	0.156
5	Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu	0.126
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	0.115
7	Pers yang bebas dalam menjalankan fungsinya	0.142

Tabel 2.3 Bobot pada Indikator Aspek Kesetaraan

	Indikator	Bobot
8	Kesetaraan Gender	0.108
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	0.122
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	0.173
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	0.188
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	0.129
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	0.140
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	0.138

Tabel 2.4. Bobot pada Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

	Indikator	Bobot
15	Kinerja Lembaga Legislatif	0.104
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	0.148
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	0.134
18	Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	0.095
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	0.123
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	0.132
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	0.160
22	Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	0.103

Langkah-langkah penghitungan IDI tiap provinsi adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama adalah menghitung indeks tiap-tiap indikator di tingkat provinsi. Skor indikator dihitung dengan rumus

$$I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{\text{terburuk}})}{(X_{\text{ideal}} - X_{\text{terburuk}})} \times 100 \quad (1)$$

dimana

X_{ijk} : tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari provinsi ke i, aspek ke j, indikator ke k.

X_{ideal} : tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator X_{ijk}

X_{terburuk} : tingkat capaian terburuk dari indikator X_{ijk}

Sehingga persamaan (1) menghasilkan nilai $0 \leq \text{Indeks } (X_{ijk}) \leq 100$;

Nilai ideal dan terburuk dari setiap indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Nilai ideal dan terburuk setiap indikator

Indikator	Nilai		Keterangan	
	Ideal	Terburuk	Ideal	Terburuk
1	0	0,5	tidak ada kasus	didapatkan dari nilai maksimum data series 2017-2020 dengan mengeluarkan angka ekstrem

Indikator	Nilai		Keterangan	
	Ideal	Terburuk	Ideal	Terburuk
2	0	0,2	tidak ada kasus	didapatkan dari nilai maksimum data series 2017-2020 dengan mengeluarkan angka ekstrem
3	0	0,3	tidak ada kasus	didapatkan dari nilai maksimum data series 2017-2020 dengan mengeluarkan angka ekstrem
4	0	100	tidak ada pemda atau K/L yang memiliki aturan yang menghambat	semua pemda atau K/L memiliki aturan yang menghambat
5	0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,20 (untuk data pelanggaran pemilu) ▪ 100 (untuk data diskriminasi) 	tidak ada kasus	<ul style="list-style-type: none"> • didapatkan dari nilai maksimum data series 2014 dan 2019 dengan mengeluarka

Indikator	Nilai		Keterangan	
	Ideal	Terburuk	Ideal	Terburuk
		pemilih disabilitas)		n angka ekstrem <ul style="list-style-type: none"> • maksimum persentase
6	30	0	Target RPJMN 2024 untuk keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan	tidak ada pekerja yang perusahaannya memberikan jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan kerja, dan dana pensiun
7	100	0	nilai maksimum indeks kemerdekaan pers	nilai minimum indeks kemerdekaan pers
8	75,83	0	Didapatkan dari estimasi nilai rata-rata untuk tahun 2030 (menggunakan data series 2010-2020)	nilai minimum indeks pemberdayaan gender

Indikator	Nilai		Keterangan	
	Ideal	Terburuk	Ideal	Terburuk
9	0,5	0	didapatkan dari nilai maksimum data series 2017-2021 dengan mengeluarkan angka ekstrem	tidak ada partisipasi masyarakat
10	7	1	nilai maksimum indeks persaingan usaha	nilai minimum indeks persaingan usaha
11	100	0	nilai maksimum persentase	nilai minimum persentase
12	100	0	nilai maksimum persentase	nilai minimum persentase
13	100	0	nilai maksimum indikator indeks keterbukaan informasi publik	nilai minimum indikator indeks keterbukaan informasi publik

Indikator	Nilai		Keterangan	
	Ideal	Terburuk	Ideal	Terburuk
14	100	0	nilai maksimum persentase	nilai minimum persentase
15	100	0	jumlah peraturan yang disahkan sesuai dengan target	tidak ada peraturan yang disahkan
16	100	0	jumlah putusan sama dengan beban kasus	tidak ada putusan
17	0	2	tidak ada kasus	didapatkan dari nilai maksimum data series 2018-2020 dengan mengeluarkan angka ekstrem
18	0	2	tidak ada kasus	didapatkan dari nilai maksimum data series 2017-2020 dengan mengeluarkan angka ekstrem

Indikator	Nilai		Keterangan	
	Ideal	Terburuk	Ideal	Terburuk
19	100	0	nilai maksimum indeks kualitas lingkungan hidup	nilai minimum indeks kualitas lingkungan hidup
20	100	0	semua dokumen transparansi diunggah dalam website pemerintah	tidak ada dokumen transparansi diunggah dalam website pemerintah
21	5	0	nilai maksimum indeks pelayanan publik	nilai minimum indeks pelayanan publik
22	3	0	didapatkan dari nilai maksimum <i>data series</i> 2017-2020 dengan mengeluarkan angka ekstrem	tidak ada kegiatan pendidikan politik untuk kader parpol

2. Langkah kedua adalah menghitung indeks masing-masing aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I(A_{ij}) = \sum_{k=1}^n P_{jk} I(X_{ijk}) \quad (2)$$

dimana:

$I(A_{ij})$: Indeks provinsi ke-i aspek ke-j

P_{jk} : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k

$I(X_{ijk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI provinsi ke-i, aspek ke-j, indikator ke-k

3. Langkah ketiga adalah menghitung IDI tingkat provinsi yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$IDI_i = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{ij}) \quad (3)$$

dimana:

IDI_i : Indeks Demokrasi Indonesia di provinsi ke-i

P_j : Nilai penimbang dari aspek ke-j

$I(A_{ij})$: Indeks provinsi ke-i aspek ke-j

j : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi



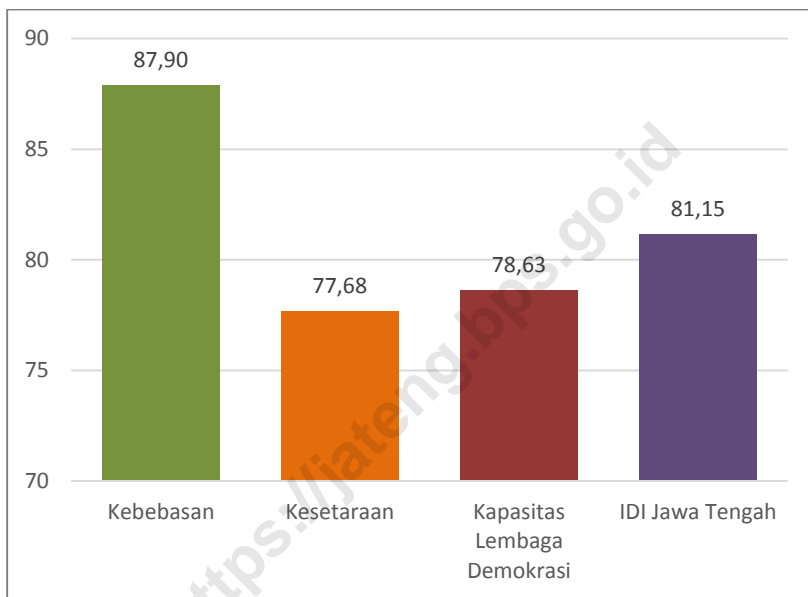
BAB 3

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA DI JAWA TENGAH

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, Indeks Demokrasi Indonesia 2021 menggunakan metode baru yang dioperasikan ke dalam tiga aspek kinerja demokrasi, yaitu: Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Masing-masing aspek tersebut terdiri dari sejumlah indikator.

Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai 81,15. Distribusi indeks dari ketiga aspek IDI adalah 87,90 untuk aspek kebebasan; 77,68 untuk aspek Kesenjangan; dan 78,63 untuk aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Distribusi indeks tiga aspek ini sekaligus memperlihatkan kontribusi dari masing-masing aspek terhadap indeks keseluruhan pada skala Provinsi Jawa Tengah, dimana aspek Kebebasan memberikan kontribusi paling tinggi, disusul oleh Kapasitas Lembaga Demokrasi, dan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah aspek Kesenjangan. Kontribusi indeks tiga aspek ini sangat jelas menggambarkan meskipun aspek Kebebasan menyokong indeks sangat tinggi (87,90) namun indeks secara keseluruhan yang dapat dicapai hanya sebesar 81,15 dikarenakan dua aspek lainnya memberikan kontribusi indeks relatif lebih rendah.

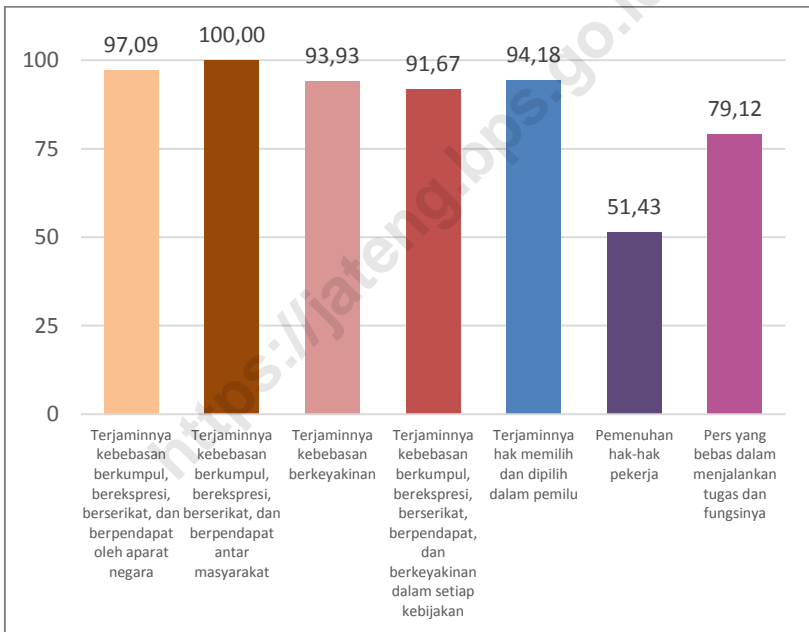
Gambar 3.1 Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah
Menurut Aspek




Indeks aspek Kebebasan yang relatif tinggi tersebut dihasilkan dari agregasi indeks enam indikator dari tujuh indikator yang membentuk indeks aspek kebebasan, yaitu: (1) Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat Negara, (2) Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat, (3) Terjaminnya kebebasan berkeyakinan, (4) Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan, (5) Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat,

dan (7) Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan satu indikator yaitu indikator (6) Pemenuhan hak-hak pekerja memberikan kontribusi yang relatif rendah.

Gambar 3.2 Indeks Demokrasi Jawa Tengah menurut Indikator pada Aspek Kebebasan



Dari Gambar 3.2 diketahui bahwa Indeks aspek Kebebasan Sipil yang tinggi tampaknya disumbangkan oleh indeks ketujuh indikator yang terdapat di dalamnya seperti terlihat pada grafik di atas. Indikator (2) Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat menyumbang indeks tertinggi yaitu 100,00.

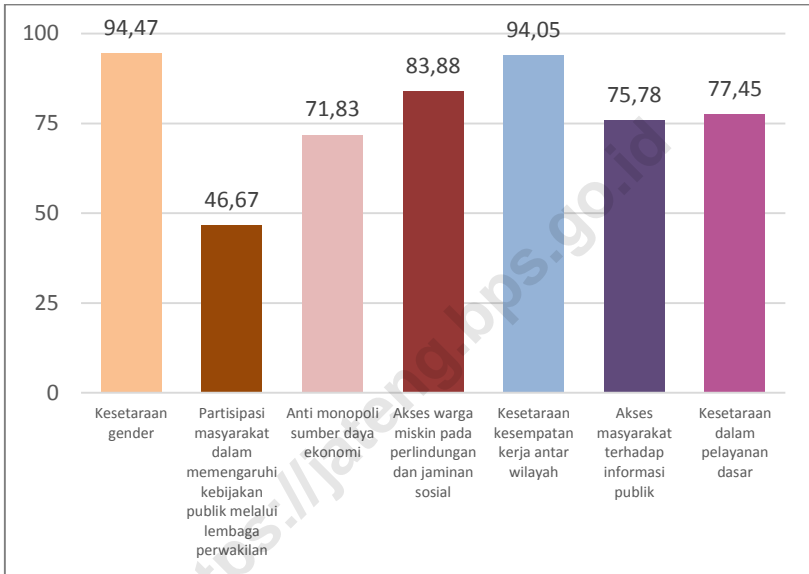


Menyusul kemudian indikator (1) Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, dan Berpendapat oleh Aparat Negara sebesar 97,09 dan indikator (5) Terjaminnya Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu dengan indeks 94,18. Indikator (3) Terjaminnya kebebasan berkeyakinan berada diurutan selanjutnya dengan nilai indeks 93,93. Menyusul kemudian Indikator (4) Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat, dan Berkeyakinan dalam Setiap Kebijakan dengan indeks 91,67 dan Indikator (7) Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyumbang aspek Kebebasan indeks sebesar 79,12. Sedangkan indikator (6) Pemenuhan hak-hak pekerja mempunyai kontribusi rendah yang dimiliki aspek Kebebasan yaitu 51,43.

Kendati enam dari tujuh indikator yang dimiliki oleh Indeks Aspek Kesenjangan yakni (8) Kesenjangan gender (94,17) dan (12) Kesenjangan kesempatan kerja antar wilayah, memberikan kontribusi indeks tinggi (94,05), (11) Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial (83,88), (14) Kesenjangan dalam pelayanan dasar (77,45), (13) Akses masyarakat terhadap informasi publik (75,78), dan (10) Anti monopoli sumber daya ekonomi (71,83). Namun demikian indikator (9) Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan memberikan kontribusi indeks sangat rendah yaitu sebesar 46,67. Agregasi dari indeks tujuh indikator ini pada akhirnya telah memosisikan indeks Provinsi Jawa Tengah untuk aspek Kesenjangan berada pada angka 77,68 (Gambarl 3.3).

Gambar 3.3 Indeks Demokrasi Jawa Tengah menurut

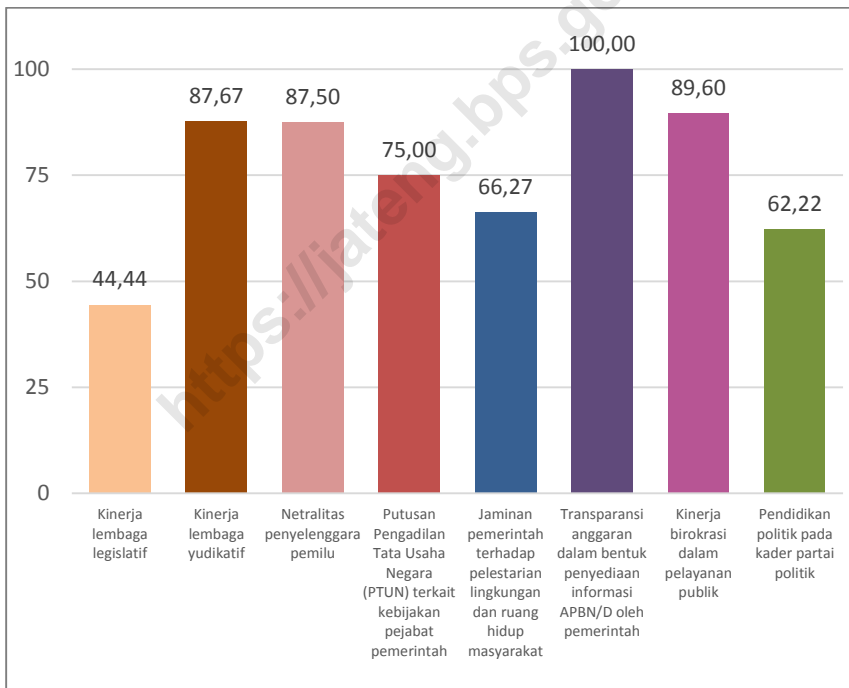
Indikator pada Aspek Kesetaraan



Indeks aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi di Jawa Tengah juga cukup rendah. Hal tersebut disebabkan kontribusi salah satu dari sepuluh indikator yang pembentuknya memiliki nilai yang rendah, yakni indikator (15) Kinerja Lembaga Legislatif yang hanya mencapai indeks 44,44. Indikator (20) Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah merupakan indikator tertinggi dalam aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dengan indeks 100,00. Indikator lain dalam aspek yang sama yakni Indikator (21) Kinerja Birokrasi dalam Pelayanan Publik (89,60), indikator (16) Kinerja Lembaga Yudikatif (87,67), indikator (17) Netralitas Penyelenggara Pemilu (87,50). indikator (18) Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Kebijakan Pejabat Pemerintah (75,00), indikator (19) Jaminan Pemerintah terhadap Pelestarian Lingkungan dan Ruang Hidup Masyarakat (66,27), dan indikator (22) Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik, (62,22).

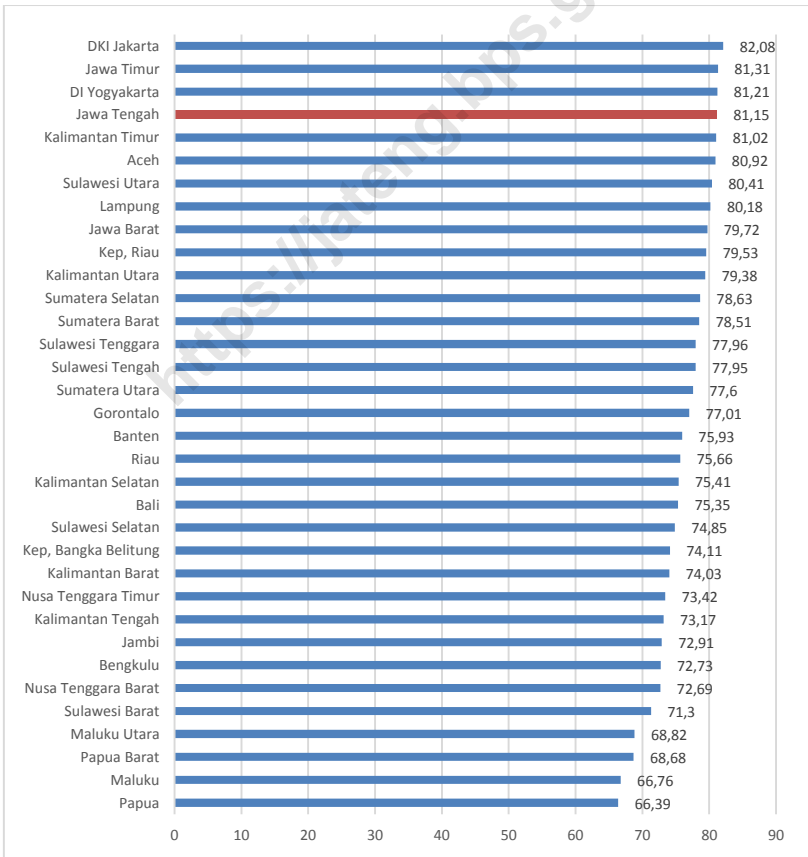
Gambar 3.4 Indeks Demokrasi Jawa Tengah menurut Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi




BAB 4 PERBANDINGAN DENGAN PROVINSI LAIN DI INDONESIA

Diantara 34 provinsi di Indonesia, nilai Indeks Demokrasi Jawa Tengah menduduki peringkat keempat setelah DI Yogyakarta (81,21), Jawa Timur (81,31) dan DKI Jakarta (82,08).

Gambar 4.1 Indeks Demokrasi Provinsi menurut Peringkat



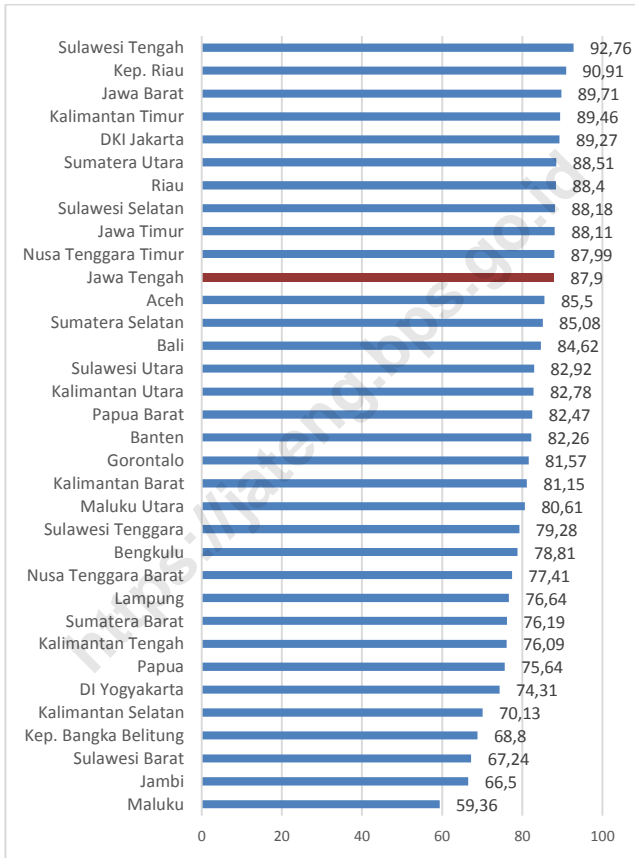


Informasi secara lengkap tentang indeks demokrasi secara keseluruhan pada 34 provinsi di Indonesia disajikan pada Gambar 4.1. Bila dicermati visualisasi angka-angka indeks pada Gambar 4.1. tersebut, terlihat dengan jelas tidak satu pun provinsi di Indonesia memiliki indeks dengan indeks kurang dari 60. Nilai indeks demokrasi terendah adalah Provinsi Papua dengan nilai indeks 66,39.

Sebagaimana diuraikan di awal, IDI 2021 mengukur demokrasi melalui indeks ketiga aspeknya, yaitu aspek Kebebasan, Aspek Kesenjangan, dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Grafik 4.2 secara jelas menampilkan indeks aspek Kebebasan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Terlihat hasilnya cukup menggembirakan karena mayoritas provinsi mempunyai angka indeks aspek Kebebasan diatas 60, kecuali Provinsi Maluku yang mempunyai angka indeks aspek Kebebasan 59,36.

Nilai indeks aspek Kebebasan Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat kesebelas dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi yang menduduki peringkat tertinggi untuk indeks aspek Kebebasan adalah Sulawesi Tengah dengan nilai indeks 92,76, disusul Kepulauan Riau (90,91) dan Jawa Barat (89,71) (Gambar 4.2).

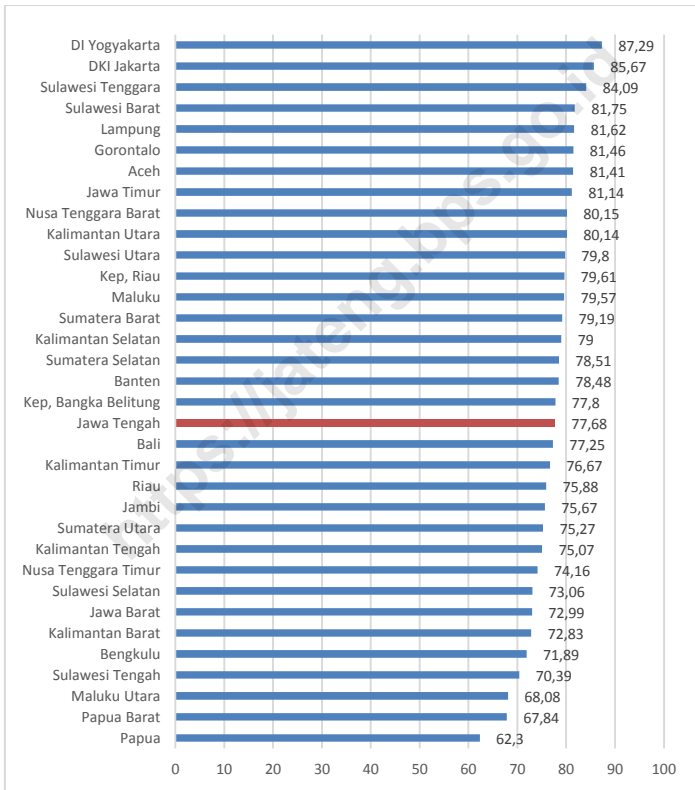
Gambar 4.2 Indeks Aspek Kebebasan menurut Provinsi



Aspek kedua yang diukur oleh IDI 2021 adalah Kesetaraan. Berdasarkan Grafik 4.3, Provinsi DI Yogyakarta menempati posisi pertama untuk aspek Kesetaraan dengan indeks 87,29, disusul oleh DKI Jakarta (85,67) dan Sulawesi Tenggara (84,09). Sedangkan tiga provinsi dengan indeks terendah adalah Papua (62,30), Papua Barat (67,84) dan Maluku

Utara (68,08). Sementara Jawa Tengah untuk nilai indeks aspek Kesetaraan berada di posisi ke 19.

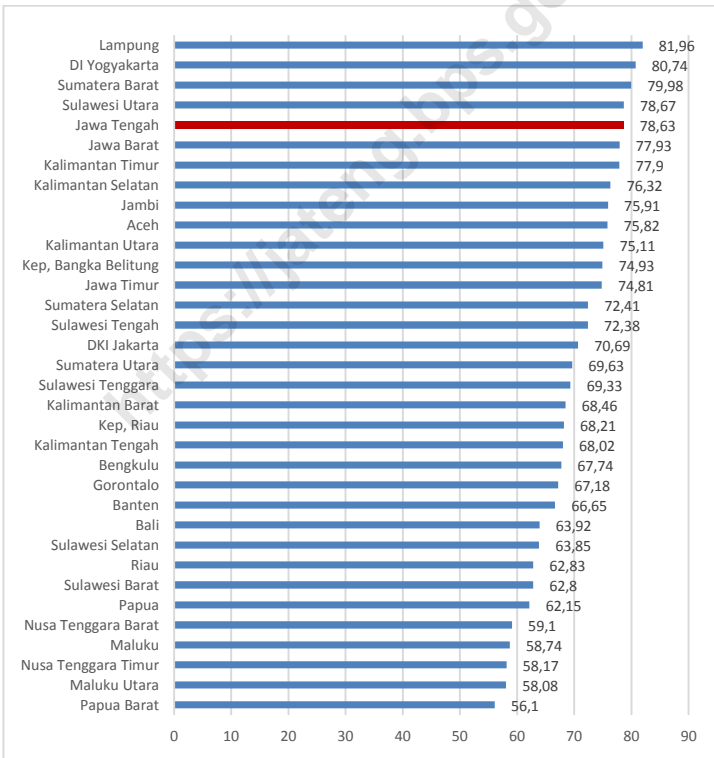
Gambar 4.3 Indeks Aspek Kesetaraan menurut Provinsi



Aspek kedua yang diukur oleh IDI 2021 adalah Kapasitas Lembaga Demokrasi. Posisi Jawa Tengah untuk aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang bernilai indeks 78,63, berada pada urutan kelima setelah Sulawesi Utara (78,67), Sumatera Barat (79,98), DI Yogyakarta (80,74), dan Lampung

yang menduduki peringkat pertama dengan nilai indeks untuk aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 81,96. Sementara Papua Barat menduduki peringkat terakhir dengan nilai indeks aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 56,10.

Gambar 4.4 Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi menurut Provinsi





<https://jateng.bps.go.id>

**Lampiran 1. Indeks Aspek, dan Skor Indikator IDI
Provinsi Jawa Tengah 2021**

ASPEK / INDIKATOR		2021
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH		81,15
I. Kebebasan		87,90
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	97,09
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	100,00
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	93,93
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	91,67
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	94,18
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	51,43
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	79,12
II. Kesenjangan		77,68
8	Kesenjangan Gender	94,47
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	46,67
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	71,83
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	83,88
12	Kesenjangan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	94,05
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	75,78
14	Kesenjangan dalam pelayanan dasar	77,45



ASPEK / INDIKATOR		2021
III.	Kapasitas Lembaga Demokrasi	78,63
15	Kinerja Lembaga Legislatif	44,44
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	87,67
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	87,50
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	75,00
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	66,27
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100,00
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	89,06
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	62,22

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia

Lampiran 2. Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi

No	Provinsi	2021
(1)	(2)	(3)
1	Nanggroe Aceh Darrussalam	80,92
2	Sumatera Utara	77,60
3	Sumatera Barat	78,51
4	Riau	75,66
5	Jambi	72,91
6	Sumatera Selatan	78,63
7	Bengkulu	72,73
8	Lampung	80,18
9	Kep. Bangka Belitung	74,11
10	Kep. Riau	79,53
11	DKI Jakarta	82,08
12	Jawa Barat	79,72
13	Jawa Tengah	81,15
14	DI Yogyakarta	81,21
15	Jawa Timur	81,31
16	Banten	75,93
17	Bali	75,35
18	NTB	72,69
19	NTT	73,42
20	Kalimantan Barat	74,03
21	Kalimantan Tengah	73,17
22	Kalimantan Selatan	75,41
23	Kalimantan Timur	81,02
24	Kalimantan Utara	79,38
25	Sulawesi Utara	80,41

Lampiran 2

No	Provinsi	2021
(1)	(2)	(3)
26	Sulawesi Tengah	77,95
27	Sulawesi Selatan	74,85
28	Sulawesi Tenggara	77,96
29	Gorontalo	77,01
30	Sulawesi Barat	71,30
31	Maluku	66,76
32	Maluku Utara	68,82
33	Papua Barat	68,68
34	Papua	66,39

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia

Lampiran 3. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi

No	Provinsi	Aspek Kebebasan	Aspek Kesetaraan	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nanggroe Aceh Darrussalam	85,50	81,41	75,82
2	Sumatera Utara	88,51	75,27	69,63
3	Sumatera Barat	76,19	79,19	79,98
4	Riau	88,40	75,88	62,83
5	Jambi	66,50	75,67	75,91
6	Sumatera Selatan	85,08	78,51	72,41
7	Bengkulu	78,81	71,89	67,74
8	Lampung	76,64	81,62	81,96
9	Kep. Bangka Belitung	68,80	77,80	74,93
10	Kep. Riau	90,91	79,61	68,21
11	DKI Jakarta	89,27	85,67	70,69
12	Jawa Barat	89,71	72,99	77,93
13	Jawa Tengah	87,90	77,68	78,63
14	DI Yogyakarta	74,31	87,29	80,74
15	Jawa Timur	88,11	81,14	74,81
16	Banten	82,26	78,48	66,65
17	Bali	84,62	77,25	63,92
18	NTB	77,41	80,15	59,10
19	NTT	87,99	74,16	58,17
20	Kalimantan Barat	81,15	72,83	68,46
21	Kalimantan Tengah	76,09	75,07	68,02
22	Kalimantan Selatan	70,13	79,00	76,32
23	Kalimantan Timur	89,46	76,67	77,90

Lampiran 3

No	Provinsi	Aspek Kebebasan	Aspek Kesetaraan	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	Kalimantan Utara	82,78	80,14	75,11
25	Sulawesi Utara	82,92	79,80	78,67
26	Sulawesi Tengah	92,76	70,39	72,38
27	Sulawesi Selatan	88,18	73,06	63,85
28	Sulawesi Tenggara	79,28	84,09	69,33
29	Gorontalo	81,57	81,46	67,18
30	Sulawesi Barat	67,24	81,75	62,80
31	Maluku	59,36	79,57	58,74
32	Maluku Utara	80,61	68,08	58,08
33	Papua Barat	82,47	67,84	56,10
34	Papua	75,64	62,30	62,15

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

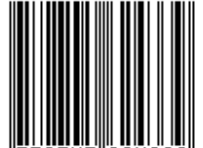
<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan, No.6 Semarang, 50241
Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195
Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail: bps3300@bps.go.id

ISSN 2745-6242



9 772745 624339